

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DI KOTA TASIKMALAYA (Studi kasus di SDN Karsanagara Kawalu Kota Tasikmalaya)

Ridwan Nurkarim, Ishak Kusnandar
Prodi Ilmu Administrasi Negera, STIA YPPT Pritim
Tasikmalaya
Email : ridwan.nurkarim03@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kota Tasikmalaya (Studi Kasus SDN Karsanagara Kota Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini penulis memakai teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn karena untuk mengukur implementasi kebijakan dapat dilihat dari Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik badan pelaksana, Komunikasi antarorganisasi, Disposisi pelaksana, Lingkungan Sosial, ekonomi, politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi sumber. Berlandaskan hasil penelitian yang mana sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya implementasi kebijakan program kartu indonesia pintar (KIP) berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan dan diperbaiki lagi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi program kartu indonesia pintar yaitu dari segi tujuan dan sasaran kebijakan yang ada di SDN Karsanagara target penerimanya belum sesuai dengan keadaan ekonomi siswa yang sebenarnya, kemudian dari dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yaitu sebagian masyarakat masih ada yang belum mendapatkan bantuan program tersebut, sehingga masih ada kecemburuan sosial bagi siswa yang tidak mendapatkan bantuan program kartu indonesia pintar yang di SDN Karsanagara.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar

ABSTRACT

This thesis isentitled Implementation of Smart Indonesia Card Program (KIP) Policy in Tasikmalaya (Case Study of Karsanagara Elementary School in Tasikmalaya City). This study aims to determine and analyze the implementation of the smart indonesian card program (KIP) in Tasikmalaya. In this study, the authors use theory of policy implementation purposed by Van Meter and Van Horn because to measure policy implementation can be seen from the Objectives and Targets of the Policy, Resources, Characteristics of the implementing agency, Inter-organizational Communication, Implementing Disposition, Social Environment, Economic, Politics. This study uses a qualitative approach with source triangulation techniques, Based on the result of the research that the been done, it can be concluded that the implementation of the smart indonesian card, policy is going well, but it needs to be improved again because there ARE several factors that affect the implementation of the , namely in terms of the goals and objectives of the existing policies in Karsanagara target recipients are not in accordance with the actual economic conditions of student, then from the dimensions of the economic, social, and political environment, there are still some people who have not received the assistance of the program, so that there is still social jealousy for student who do not receive the assistance of the smart Indonesia card program at SDN Karsanagara.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Card (KIP)

PENDAHULUAN

Dalam proses eksekusi strategi merupakan tahapan yang vital. Berbagai strategi telah dilakukan dengan baik, namun tidak berdampak pada eksistensi Negara karena tidak dijalankan sesuai harapan. Sesuai dengan visi dan rencana kerja badan publik tersebut di atas dan Pasal 4 Peraturan Menteri Nomor 166 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan program jaminan sosial, badan publik menerbitkan kartu kepribadian bagi penerima manfaat program jaminan sosial, salah satunya adalah Kartu Indonesia Cemerlang. (KIP) sesuai Arahan Dinas Pendidikan Nomor 7 Tahun 2014 antara lain memerintahkan Program Indonesia Cemerlang (PIP) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Cerdas (KIP) dan mensosialisasikan Program Indonesia Cerdas kepada siswa yang wali tidak bisa mengelola biaya itu.

Adapun permasalahan terkait implementasi kebijakan sistem kartu indonesia pintar yaitu :

1. Belum tepat sasaran, contohnya : siswa A dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang belum menerima bantuan PIP
2. Kurangnya sosialisasi dari pelaksana terhadap masyarakat ataupun siswa, contohnya : masih adanya masyarakat miskin yang belum mengetahui persyaratan dalam Pencairan Program KIP

Sedangkan tujuan penelitian ialah guna bisa mengetahui implementasi kebijakan program kartu indonesia pintar dikota tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan publik
 - a. Menurut (Kusnandar, 2019) mengungkapkan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik.
 - b. Adapun Kebijakan Publik menurut (Purwanto, 2010) yaitu alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*).
 - c. Menurut (Nugroho, 2003) Kebijakan publik kedepan ialah cara untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Dalam hal cita-cita rakyat Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Pemerintahan dengan Aturan Mayoritas dan Pemerataan) dan Undang-Undang Dasar 1945, maka strategi terbuka merupakan landasan dan berarti sampai pada "fokus objektif" ini..
2. Implementasi Kebijakan Publik
 - a. Menurut (Tangkilisan, 2003) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan ialah tahap dinamis antara pengembangan strategi serta artikel dalam demonstrasi berwibawa, memberikan pedoman pemimpin, melewati pilihan pengadilan, atau memberikan pedoman standar dan hasil strategi bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa bagian dari mereka.
 - b. (Tahir, 2014) mengemukakan Eksekusi suatu strategi pada dasarnya merupakan perubahan atau perubahan yang multihierarkis, dimana progres yang tidak sepenuhnya diselesaikan melalui teknik eksekusi strategi ini menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, eksekusi atau pelaksanaan pengaturan dihubungkan dengan usaha untuk mencapai tujuan dasar dari strategi tertentu.
 - c. Menurut (Agustino, 2020, hal. 144) Implementasi kebijakan yaitu cara paling umum untuk membuat interpretasi pedoman langsung ke dalamnya. Pada akhirnya, eksekusi strategi merupakan interaksi yang membingungkan sedemikian rupa sehingga diharapkan sepenuhnya memiliki substansi politik karena mediasi kepentingan yang berbeda.

3. Kartu Indonesia Pintar
a. Pengertian pelatihan kerja

Program Indonesia Cemerlang adalah bantuan dari otoritas publik untuk siswa yang tertindas/miskin, dengan harapan dapat mengurangi angka putus sekolah. Menurut Kelompok Masyarakat untuk Percepatan Peningkatan Penurunan Kebutuhan (TNP2K), program Indonesia Cerdas melalui KIP adalah pengaturan bantuan uang pendidikan kepada semua anak muda (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Bantuan Pemerintah Keluarga (KKS).) atau yang memenuhi langkah-langkah yang telah ditentukan sebelumnya.

Sesuai dengan Pedoman Pendeta Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Cemerlang, maka Program Indonesia Cerdas yang selanjutnya disingkat PIP adalah membantu jenis uang, memperluas akses, dan memperoleh keterbukaan. pintu dari otoritas publik yang diberikan kepada siswa dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu atau tidak berdaya terhadap kemiskinan untuk membiayai sekolah.

Pandangan van metter & van horn dalam (Agustino, 2020) implementasi kebijakan dipengaruhi enam faktor :

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Tujuan dan Sasaran Kebijakan harus tepat serta jelas, hingga meraih tujuan kebijakan sesuai diharapkan.
2. Sumber Daya
Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya, dari sumber daya manusia agar kebijakan tersebut terealisasi dengan baik.
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Faktor ini dapat diakibatkan oleh kebijakan yang diterapkan bukan hasil dari pembentukan penduduk yang akrab dengan masalah yang dirasakan.
4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana
Faktor ini dapat diakibatkan oleh kebijakan yang diterapkan bukan hasil dari pembentukan penduduk yang akrab dengan masalah yang dirasakan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivistis Pelaksana

Koordinasi merupakan komponen sekaligus kebutuhan utama dalam menentukan hasil eksekusi strategi. Semakin baik koordinasi dan korespondensi antara pertemuan yang terkait dengan siklus eksekusi, semakin sedikit kesalahan yang akan terjadi; begitu juga sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Upaya implementasi kebijakan juga dilakukan karena lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang dapat mendukung berhasilnya kebijakan. Lingkungan yang dituju adalah yang dapat mendukung berhasilnya kebijakan yang tetap, serta sekitar yang tidak mendukung bisa jadi masalah

METODE

Metode yang mana dipakai dalam penelitian ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif ialah metode pengolahan data dengan menganalisis faktor yang berhubungan dengan subjek penelitian dengan cara menyajikan data lebih dalam kepada subjek penelitian dengan cara menyajikan data lebih dalam kepada subjek penelitian. Untuk melaksanakan tuntutan metode tersebut, penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai orang yang paling penting dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan dan sasaran Kebijakan

Dalam meneliti suatu proses kebijakan yang sedang berjalan atau yang sudah diterapkan, sedangkan alasannya adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun menjadi 21 (21) tahun untuk mendapatkan administrasi instruksi sampai dengan penyelesaian unit instruksi opsional untuk membantu pelaksanaan diklat/penerbangan luas pembantu 12 (dua belas) tahun. pelajaran wajib, Jauhkan siswa dari keluar jadwal harian melanjutkan sekolah mereka karena kesulitan keuangan; atau berpotensi Menarik siswa yang telah keluar sekolah (exited) atau tidak terus mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, fokus kegiatan pembelajaran, fokus gerakan pembelajaran lokal, yayasan kursus dan persiapan, unit pengajaran non-formal lainnya, atau pusat pembelajaran profesional. Pencapaian kebijakan ini sudah direalisasikan namun belum optimal karena untuk sasarnya masih terdapat kekurangan, sehingga belum sepenuhnya masyarakat menerima bantuan KIP, adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan, dengan kata lain tetapi untuk yang sudah menjadi penerima bantuan KIP mereka merasakan akan tujuan dari kartu Indonesia Pintar ini yakni untuk memudahkan siswa dan meringankan beban orang tua dalam hal pendidikan, sehingga

pemerintah sangat perhatian terhadap kelangsungan pendidikan yang mengeluarkan kebijakan seperti ini,

2. Sumber daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ialah hal yang sangat penting, dalam kebijakan kartu indonesia pintar, untuk dukungan sarana dan untuk sarana prasarana di SDN Karsanagara ini sudah cukup memadai dapat kita lihat dalam hasil penelitian sebelumnya yang telah penulis sajikan diatas.

Dana yang didapat juga cukup memadai karena dana tersebut berasal dari APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Adapun untuk petugas dan pengawas kip itu sendiri sudah dikatakan optimal demi keberjalanan implementasi bantuan kartu indonesia pintar.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana ikut menjadi salah satu hal yangmana harus diperhatikan dalam suatu implementasi, dalam hal ini sekolah dasar negeri karsanagara kota tasikmalaya sebagai pelaksana selalu berusaha memahami tiap siswanya sesuai kebutuhan mereka. Kemudian sebagai aturan dari dinas pendidikan kota tasikmalaya berkebebasan berkomunikasi secara vertikal selalu dilakukan guna memberikan masukan atau saran kepada Lembaga sekolah secara langsung begitupun sebaliknya. Lembaga sekolahpun selalu memberikan yang sesuai dengan pedoman ataupun pengajuan yang akan disampaikan kepada tiap siswanya sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dalam hal ini Karakteristik Instansi pelaksana dapat dikatakan sudah optimal.

4. Sikap Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Sikap penerimaan dari pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kartu indonesia pintar ini para implementor mengetahui perihal kebijakan KIP ini dan sudah berjalan sesuai peraturan namun dari jenis pelaksanaannya belum terealisasi semuanya, karena masih ada siswa yang belum mendapatkan tetapi dalam kategori tidak mampu. Namun untuk secara umum sikap sdn karsanagara Kota Tasikmalaya dapat melaksanakan program bantuan kartu indonesia pintar sesuai permendikbud tentang. Kemudian dilihat dari pemahaman para pelaksana terhadap siswanya sangat berusaha memahami seuai dengan kebutuhan siswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis memandang bahwa dalam disposisi pelaksana masih dikatakan belum optimal.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam komunikasi selalu berjalan antara sdn karsanagara kota tasikmalaya dengan Dinas pendidikan Kota Tasikmalaya, bahkan komunikasi dilakukan setiap satu tahun sekali oleh Dinas pendidikan

Tasikmalaya kepada Lembaga sekolah khususnya sdn karsanagara Kota Tasikmalaya dalam melakukan pembinaan mensosialisasikan peraturan terkait kartu indonesia pintar, selain itu komunikasinya juga berbentuk permohonan pengajuan siswa yang mengajukan bantuan KIP kepada dinas pendidikan berupa aplikasi yang dicanangkan oleh dinas pendidikan Kota Tasikmalaya, Kemudian Dinas pendidikan memberikan informasi kepada pihak Lembaga sekolah mengenai pedomanataupun persyaratan yang harus terpenuhi dalam pengajuan bantuan KIP, dengan kata lain Dinas pendidikan selalu berkoordinasi dengan sekolah dasar karsanagara dalam proses yang akan dilaksanakannya pencairan bantuan KIP selalu dimonitoring dan di evaluasi hasilnya. Sehingga Komunikasi Antarorganisasi dan kegiatan penegakkan belum optimal karena masih adanya masyarakat yang gagal dalam pencairannya dikarenakan gagal paham ketika komunikasi dilakukan yang mengakibatkan salah dalam pengumpulan persyaratannya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik

Secara umum masyarakat tidak terlalu mengetahui tentang permendikbud tetapi dari partisipasi masyarakat untuk mengajukan bantuan kip sangat antusias, untuk masyarakat yang mengetahui serta menerima bantuan kip berpengaruh terhadap berkurangnya beban orang tua apalagi yang dikategorikan tidak mampu karena dengan adanya bantuan tersebut para orangtua siswa sangat merasa terbantu. Maka berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dapat memandang bahwa untuk lingkungan ekonomi, sosial, politik ini belum dikatakan optimal karena tidak semua masyarakat mendapatkan dan sering terjadi kecemburuan sosial.

Pernyataan ini pun didukung oleh Jawaban dari alumni peserta pelatihan bahwa sikap dari para pelaksana di Lembaga pelatihan kerja Yuwita ini sudah baik, misalnya mereka bekerja dengan baik dan selalu memperhatikan peserta pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam sikap para pelaksana ini sudah baik. Para pelaksana pun sudah menyadari akan tugas yang mereka harus lakukan, Misalnya selalu mengumumkan atau menginfokan dimana akan diadakannya kegiatan pelatihan kerja dengan cara disebarkannya informasi melalui berbagai sosial media.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yangmana didapat dari lapangan berkaitan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SDN Karsanagara Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan

bahwa Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik meski memang terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dimensi-dimensi yang mempengaruhi implementasi, yakni :

- 1 Berdasarkan hasil penelitian dalam Tujuan dan Sasaran Kebijakan belum berhasil dilaksanakan di SDN Karsanagara ini. Dalam proses pemilihan siswa bantuan KIP belum tepat sasaran karena masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi belum menerima bantuan tersebut.
- 2 Sumber Daya dalam pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar di SDN Karsanagara Kota Tasikmalaya dalam berbagai aspek seperti aspek sumber daya manusia dan anggaran sudah baik. Karena dilihat dari aspek tersebut para petugas KIP dan pengawas KIP sudah memenuhi aspek-aspek tersebut. Seperti petugas KIP yang sudah memenuhi aspek SDM.
- 3 Karakteristik Agen Pelaksana yang terkait dengan pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini sudah jelas. Para pelaksana pun selalu memberikan pengawasan kepada para siswa setiap tahunnya. Demikian dengan komunikasi antar para pelaksana baik secara vertikal maupun horizontal dilaksanakan dengan baik meski ada beberapa hambatan yang terjadi. Secara keseluruhan pun dalam karakteristik agen pelaksana sudah terlaksana dengan baik.
- 4 Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana dalam implementasi Kebijakan kartu Indonesia pintar (KIP) di sdn karsanagara sudah terlaksana dengan baik. Dengan petugas KIP, kepala sekolah sdn karsanagara yang selalu mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat maupun para penerima KIP terkait dengan proses pelaksanaan kartu Indonesia pintar. Para petugas, kepala sekolah sdn karsanagara serta pegawai dinas pendidikan kota tasikmalaya pun akan memberikan jalan keluar untuk keluhan-keluhan yang ada dengan cara menjelaskan ataupun memberikan saran kepada para siswa dan masyarakat setempat.
- 5 Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, berkaitan dengan hal tersebut di SDN Karsanagara ini masih ada beberapa permasalahan mengenai komunikasi antar badan pelaksana. Seperti tidak sinkronnya data sekolah dan data dinas itu di sebabkan kurangnya komunikasi yang baik. Kemudian hal ini menjadi hambatan dalam pencairannya yang disebabkan gagalnya komunikasi pelaksana terhadap masyarakat.
- 6 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dalam menilai suatu keberhasilan kebijakan diantaranya yaitu sejauh mana lingkungan eksternal mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Selanjutnya

kondisi sosial pun terkadang menjadi salah satu penghambat bagi para masyarakat. Misalnya masyarakat yang tidak menerima Bantuan kip ini bisa mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat penerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima Bantuan kartu indonesia pintar. Mereka bertanggapan bahwa yang menerima kip hanya orang-orang memiliki kedekatan dengan para pelaksana. Sehingga terjadinya kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh permasalahan tersebut. Dalam permasalahan ini, tugas petugas kip yang harus menyelesaikan atau memecahkan masalah kecemburuan sosial tersebut. Misalnya, dengan cara memberikan pengertian dan penjelasan kepada masyarakat yang belum/tidak mendapatkan Bantuan kartu indonesia pintar (KIP) tersebut. Karena memang dalam Program Bantuan kartu indonesia pintar dapat menimbulkan permasalahan sosial yaitu dalam kecemburuan sosial antara masyarakat dan masyarakat Penerima kip.

Dan yang terakhir dalam proses pelaksanaan kebijakan KIP dalam aspek politik. Dimana dalam hal ini masyarakat Penerima (KIP) tidak akan merasakan dampak dari aspek politik ini karena aspek ini tidak ada hubungannya dengan program kip tersebut, karena ini adalah program yang diadakan oleh Kementrian pendidikan. Jadi, setiap permasalahan yang muncul bisa diselesaikan dengan baik dan akan dijelaskan oleh petugas kip, karena fungsi petugas kip adalah menyelesaikan keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat maupun di masyarakat penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di sekolah dasar negeri karsanagara kota tasikmalaya ada beberapa saran yang perlu dikemukakan tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Saran Teoritis

1. Analis merekomendasikan pemeriksaan lebih lanjut terkait eksekusi strategi Kartu Indonesia Cemerlang (KIP) di Kota Tasikmalaya dari hipotesis selain Donald van Metter dan Carl van Horn untuk menggali data lebih jauh sesuai perspektif spekulasi yang berbeda.
2. Harus ada eksplorasi lebih lanjut tentang teknik-teknik agar strategi KIP bisa berjalan lebih baik.

Saran Praktis

1. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan ulang dan melakukan survei secara teliti dalam verifikasi data penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar penerima kip tidak salah sasaran.

- 2 Agar proses kebijakan berjalan dengan baik, seharusnya dalam komunikasi antar para pelaksana implementor harus terjalin dengan baik agar tidak terjadi permasalahan antar pelaksana KIP.
- 3 Seharusnya sebagai petugas harus lebih memperhatikan arahan-arahan dari pengawas dalam hal waktu penyaluran KIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- D Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Kusnandar, I. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Nogi S Tangkilisan, H. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset.
- Purwanto, A. (2010). *Implementasi kebijakan publik*. GAVA MEDIA.